

RANCANGAN KEGIATAN SEKRETARIAT JENDERAL

No	Uraian Kegiatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Waktu	Keterangan
1	Pengalihan Anggaran	Melaksanakan TM bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan	Karo Perencanaan dan Organisasi	(contoh : Februari 2025)	
2	Efisiensi Anggaran	Membuat usulan tambahan			
3	Pengalihan SDM	(agar diisi masing-masing penanggung jawab)	Karo SDM		
4	Pengalihan Sistem pada masing-masing Kementerian	(agar diisi masing-masing penanggung jawab)	Kapusdatin		
5	Penyelesaian Administrasi Keuangan (Gaji dan Tunjangan)	(agar diisi masing-masing penanggung jawab)	Karo Keuangan		
6	Penyelesaian Administrasi Tata Kelola Aset dan BMN	(agar diisi masing-masing penanggung jawab)	Karo BMN		
7	Pengaturan Obyek Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rasuna Said (Contoh: Balkesmas)	(agar diisi masing-masing penanggung jawab)	Karo Umum		
8	Penyelesaian Kerjasama Media dan Penyesuaian kembali Nomenklatur Permenkumham menjadi Permenkum	- Telah dilakukan komunikasi yang telah mencapai kesepakatan dengan media cetak (Media Indonesia) dan Media online (Kompas.com liputan6.com dan cnnindonesia.com)	Karo Hukerma	Maret s.d. Desember 2025	Seluruh pembayaran akan dilakukan dengan mekanisme kuitansi yang disebabkan adanya efisiensi anggaran. Hal yang sama juga diberlakukan

					kepada UKE I lainnya. Kerjasama dengan media terkait dengan pemberitaan mengenai Hari Pengayoman, Refleksi Akhir Tahun, Peringatan Hari Kemerdekaan RI, dll)
		- Telah ditetapkan Kepmenkum Nomor M.HH-1.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Program penyusunan Peraturan Menteri Hukum Tahun 2025	Karo Hukerma		Didalamnya berisi 45 rencana peraturan Menteri Hukum
		- Akan diselenggarakan rapat pembahasan Progsun dengan UKE I		Senin, 17 Februari 2025	
		- Mengirimkan surat kepada setiap UKE I di lingkungan Kementerian Hukum terkait usulan penyesuaian kembali nomenklatur dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM menjadi Peraturan Menteri Hukum			

ATENSI MENTERI

No	Uraian Kegiatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Waktu	Keterangan
1	Transformasi Digital	(agar diisi masing-masing penanggung jawab)	Kapusdatin		
2	Penyelesaian Amnesti	(agar diisi masing-masing penanggung jawab)	Dirjen AHU		
3	Kerjasama Aset BMN di Tangerang	(agar diisi masing-masing penanggung jawab)	Karo BMN		
4	Penempatan Karo Hukum pada K/L	(agar diisi masing-masing penanggung jawab)	Karo SDM		
5	Pembentukan Program Studi Baru	(agar diisi masing-masing penanggung jawab)	Kepala BPSDM		
6	<i>MoU</i> dengan Mahkamah Agung terkait Kurator	Draft <i>MoU</i> dari Kementerian Hukum telah disiapkan, dan sampai saat ini masih menunggu <i>counterdraft</i> dari pihak Mahkamah Agung setelah dilakukan pleno Hakim Agung.	Karo Hukerma	Maret 2025	Menunggu keputusan dari Mahkamah Agung
7	Merit Sistem	(agar diisi masing-masing penanggung jawab)	Karo SDM		
8	Pembuatan <i>Control Room</i> Menteri	(agar diisi masing-masing penanggung jawab)	Karo Umum		
9	Pembuatan <i>Podcast Room</i> Kemenkum	Telah dilakukan audisi host podcast dari masing-masing UKE I dan Kantor Wilayah, serta UPT dengan total peserta 37 orang dan telah pula dilakukan penilaian tahap I	Karo Hukerma dan Karo Umum	Seleksi Tahap II pada Kamis, 13 Februari 2025	Untuk ruang podcast on progress oleh Biro Umum

		sehingga diperoleh 15 peserta terbaik yang akan menjalani proses seleksi tahap II.			
10	Pembaharuan Peraturan Menteri terkait <i>Re-entry</i> Program	(agar diisi masing-masing penanggung jawab)	Dirjen PP		
11	Peningkatan PNBPFidusia	(agar diisi masing-masing penanggung jawab)	Dirjen AHU		

No	Uraian Kegiatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Waktu	Keterangan
6	Penyelesaian Administrasi Tata Kelola Aset dan BMN	Tata Kelola Pengadaan (Hidayah)	Karo BMN	Mei 2025	
		Pemutakhiran Kelembagaan UKPBJ (Budi)		April 2025	
		Rapermen P3DN (Hestu)		Februari 2025	
		Penyusunan Laporan Barang Pengguna (Yessy)		Februari 2025	
		Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data BMN Kemenkumham dengan DJKN (Adhe)		Februari 2025	
		Perjanjian Penggunaan Sementara dan Bersama Kanwil (Santria)		Februari – Desember 2025	
		Perjanjian Penggunaan Sementara dan Bersama KemenImpas dan KemenHAM (Khikmatul)		Februari – Desember 2025	
		Perjanjian Penggunaan Sementara dan Bersama Kemenko (Rati)		Februari – Desember 2025	
		Alih Status Penggunaan BMN kepada Kemenimipas dan KemenHAM (Imron dan Zul)		Februari – Desember 2025	
		Penyerahan GRBB kepada KemenImpas (Yudha dan Asih)		Februari – Desember 2025	
		Tindak Lanjut Tanah yang Beririsan dengan MA (Silfi)		Februari – Desember 2025	
		Hasil Penelaahan RKBMN 2026 SIMAN (Pengelola Barang) (Wibi)		Februari 2025	

		Hasil Penelaahan RKBMN 2026 SIP-BMN (Pengguna Barang) (Euis)		Februari 2025	
		Kepmen terkait KPB (Maulana dan Caesar)		Maret 2025	
		Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan (Tono)		Februari – Desember 2025	
		Penyelesaian Permasalahan Tindak Lanjut Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan (Tono)		Februari – Desember 2025	
		Penerbitan SK Penghapusan (Tono)		Februari – Desember 2025	

No	Uraian Kegiatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Waktu	Keterangan
3	Kerjasama Aset BMN di Tangerang	- Tindak Lanjut Pemanfaatan BMN PT. Paramita - Penyelesaian Permasalahan BMN di Tangerang (Imron, Zul, Yoga)	Karo BMN	Februari – Desember 2025	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO UMUM

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	RENCANA AKSI	TIMELINE RENAKSI (TRIWULAN I/II/III/IV)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Kualitas Pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum	Indeks Nilai Kualitas Pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum	90	-	Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
			Indeks Penyusunan Peraturan Menteri Hukum Tentang Instrumen Kearsipan Kementerian Hukum	3	-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
2	meningkat kepuasan terhadap layanan tata usaha pimpinan, rumah tangga, tata usaha. Protokol dan pengamanan, serta layanan internal Sekretariat Jenderal	persentase layanan tata usaha pimpinan yang diselesaikan	Pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan	100%	-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
			Koordinasi Pelaksanaan Tugas Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
			Optimalisasi pelayanan dan administrasi persuratan pimpinan sesuai dengan prosedur		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
			Optimalisasi koordinasi dengan Unit Utama, Kantor Wilayah,Kementerian/Lembaga lainnya dalam rangka pelayanan pimpinan		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
		indeks kepuasan unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan Rumah Tangga	Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah melalui sewa menghasilkan penerimaan negara bukan pajak yang berkontribusi kepada penerimaan negara	3,1	-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
			Penghapusan BMN berupa kendaraan dan barang/ peralatan dan mesin menghasilkan penerimaan negara bukan pajak yang berkontribusi kepada penerimaan negara		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
			Alur Penghapusan BMN yang dinamis dimana barang-barang lama rusak dan usang dihapus sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak memakan tempat di gudang, tidak mengganggu keindahan ruangan dan tidak menghambat pekerjaan atau bahkan tidak membahayakan penggunaanya		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
			Alur Pengadaan BMN yang dinamis dimana barang-barang yang telah dihapus diganti dengan barang-barang baru sesuai perkembangan teknologi dan tuntutan peningkatan kenyamanan pegawai guna meningkatkan produktifitas		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
			Layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya (Bangunan Gedung Utama dan Bangunan Penunjang		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
			Fasilitasi dan koordinasi administrasi penyusunan program dan anggaran	100%	-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
			Fasilitasi dan kooorrdinasi administrasi sumber daya manusia		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
			Fasilitasi dan koordinasi administrasi keuangan		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
			Fasilitasi dan administrasi administrasi barang milik negara		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
			Fasilitasi tata persuratan dan kearsipan pada biro umum		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
		persentase layanan tata usaha yang diselesaikan	Fasilitasi urusan kerumahtangga biro umum		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV

	ineks kepuasan layanan pengamanan lingkup Kementerian Hukum	Pengamanan lingkungan terhadap demonstrasi yang terjadi di lingkungan Kementerian hukum	3,1	-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
		Pelaksanaan Pelatihan Pengamanan Pimpinan bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
		Fasilitasi keprotokolan pada acara pimpinan/hari besar Kementerian hukum		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
		Fasilitasi pengamanan unsur pimpinan Kementerian hukum		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
	Persentase layanan protokol yang diselesaikan	Fasilitasi keprotokolan pada acara pimpinan/hari besar Kementerian hukum	100%	-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
		Pelaksanaan rapat koordinasi kegiatan yang diikuti tim protokol dan pengamanan Sekretariat Jenderal dengan tim prokol kantor wilayah saat dilaksanakan kunjungan kerja pimpinan		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
		Pelaksanaan bimbingan teknis bagi petugas protokol di lingkungan Unit Utama dan Kantor Wilayah tentang pelaksanaan layanan keprotokolan dan pengamanan yang sesuai dengan standar Kementerian hukum oleh Tim Protokol dan Pengamanan Sekretariat Jenderal meliputi pengetahuan tentang Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan maupun pengetahuan tentang personil acara seperti Pembawa Acara, Dirigent, dan sebagainya;		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
		Pelaksanaan administrasi persuratan keprotokolan		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
	Indeks Kepuasan Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal terhadap layanan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal	Pelaksanaan Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja	3,1	-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
		Layanan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan operasional		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
		Pemeliharaan kendaraan dinas, pengadaan bahan bakar kendaraan, serta administrasi surat-surat kendaraan dinas		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
		Fasilitasi sarana dan prasarana dalam hal Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
		Program Kumham Sehat, Kumham Produktif. Kegiatan Olahraga Bersama dan Penyuluhan Kesehatan secara virtual dengan tema Kumham Sehat, Kumham Produktif		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV
		Pelaksanaan Pelayanan layanan kesehatan		-	Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan Tusi	I dan IV

LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PADA MASA TRANSISI

NO	KONDISI MASA TRANSISI	LANGKAH PERCEPATAN	OUTPUT
1.	Perubahan Kode Satker	Pada tanggal 17 Desember 2024, Menteri Hukum R.I. mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-1.KU.01.02 Tahun 2024 tentang Pengalihan Administrasi Pengelolaan Belanja Pegawai Akibat Perubahan Kode Bagian Anggaran, Kode Satuan Kerja, dan Nomenklatur di Lingkungan Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Perubahan atas 902 (sembilan ratus dua) Kode Satuan Kerja di Lingkungan 3 (tiga) Kementerian baru sehingga kode satker Kementerian Hukum dan HAM TERLIKUIDASI
2.	Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Kinerja Periode Januari 2025	Pada tanggal 30 Januari 2025, Kepala Biro Keuangan mengeluarkan surat Nomor SEK.3-KU.01.01-31 hal Penjelasan Keterlambatan Tunjangan Kinerja Periode Januari 2025	Informasi proses pendaftaran kode satuan kerja dan <i>supplier</i> pada Kementerian Keuangan Catatan: - Mulai tanggal 7 s.d. 11 Februari 2025 terjadi <i>trouble system</i> pada aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sehingga proses pembayaran tunjangan kinerja terkendala; - Terjadi anomali data yang menyebabkan supplier data berubah (perubahan huruf kapital, penambahan gelar, duplikasi nama pegawai yang mutasi dan rotasi) dan berdampak terhadap proses permintaan pembayaran.
3.	Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada Kantor Wilayah	Rapat Pembahasan Bersama antara Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan perwakilan Kementerian HAM pada tanggal 6 Februari 2025	1. Berdasarkan hasil rapat dimaksud diinformasikan bahwa pembayaran tunjangan kinerja satuan kerja kantor wilayah eks-Kemenkumham yang belum terbayar sebanyak 19 (sembilan belas) Kantor Wilayah dan 1 (satu) UKE-I sebanyak 1 (satu) orang pegawai akan dibayarkan melalui DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum TA 2025 sebanyak Rp4.792.893.623; Catatan: Proses pembayaran tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan

NO	KONDISI MASA TRANSISI	LANGKAH PERCEPATAN	OUTPUT
			Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan pada Pasal 16 Ayat (2) c. yang berbunyi untuk jumlah Tunggakan per tagihan di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil riviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2. Berita Acara Nomor: SEK.3.KU.03.03-25 Tentang Penyerahan Data Tunjangan Kinerja Pegawai (Eks-Kementerian Hukum dan HAM) UPT Imigrasi dan UPT Pemasarakatan Yang Belum Terbayar Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 pada 2 (dua) UKE-I dan 26 (dua puluh enam) provinsi sebesar Rp31.103.790.295; Catatan: Atas tunjangan kinerja yang belum terbayarkan telah dicatat sebagai hutang pada Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM TA 2024